

5.2.2 Saran atas rumusan masalah kedua

Aturan tentang syarat muatan minimal kontrak kerja konstruksi dapat diubah untuk memperjelas sifat syarat muatan minimal tersebut sebagai himbauan atau sebagai hukum.

Walaupun penelitian sudah menjelaskan bahwa kontrak yang tidak melengkapi syarat muatan minimal masih berlaku, masih ada potensi kekeliruan tentang keberlakuan kontrak tersebut. Untuk mengurangi potensi kekeliruan, diidentifikasi dua pilihan utama. Pertama, untuk menambahkan sanksi terhadap pengguna kontrak yang tidak mematuhi syarat muatan kontrak kerja konstruksi, agar syarat muatan kontrak konstruksi bersifat hukum. Pilihan kedua, untuk membuat lebih jelas bahwa syarat muatan kontrak kerja konstruksi bersifat himbauan (mungkin dengan menghapus syarat muatan dari peraturan perundang-undangan atau dengan mengganti kata bersifat keharusan “harus” dengan kata bersifat pilihan “dapat”.)

Untuk mengidentifikasi kebijakan terbaik dari pilihan-pilihan di atas (ditambah pilihan *business as usual*, yaitu tidak membuat perubahan), diperlukan penelitian-penelitian yang bersifat empiris.

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang Das Sein, yaitu kesadaran dan kepatuhan masyarakat sektor konstruksi terhadap syarat-syarat muatan kontrak kerja konstruksi.

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kemanfaatan peraturan tentang syarat-syarat muatan kontrak kerja konstruksi. Penelitian tersebut dapat disegmentasikan berdasarkan ukuran proyek, tingkat kompleksitas proyek, dan sifat swasta atau publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Dr Jimly, and M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Basworo, Handityo, and Redityo Januardi. "Kajian Pelaksanaan Ketentuan Minimal Kontrak Antara Pengguna Dan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan UUK 2/2017." *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (May 25, 2022): 1–10.
- Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Translated by R. Subekti and R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022.
- Direktorat Statistik Industri. *Indikator Konstruksi Triwulan III-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. Accessed March 12, 2023. <https://www.bps.go.id/publication/2023/01/31/f2f7efa952de46f4482d83a5/indikator-konstruksi-triwulan-iii-2022.html>.
- DPR RI. "Draft Naskah Akademik RUU Jasa Konstruksi 7 September 2015," September 7, 2015. Accessed November 3, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20150921-113904-7848.pdf>.
- . "Draft RUU Jasa Konstruksi 7 September 2015," September 7, 2015. Accessed November 3, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20150921-113904-8750.pdf>.
- Freeman, Michael. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. 9th ed. Sweet & Maxwell, 2014.
- Garner, Bryan A., and Henry Campbell Black, eds. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. St. Paul, MN: West, 2009.
- Gonjani, Rahefian Landu. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Keadaan Kahar (Studi Kasus: PT. Bimapatia Pradanaraya)." *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (March 23, 2022): 108–116.
- International Federation of Consulting Engineers. *Conditions of Contract for Construction*. 1. ed. Lausanne: FIDIC, 1999.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ed. *Buku Konstruksi 2021 Buku 1*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022. Accessed March 12, 2023. https://binakonstruksi.pu.go.id/storage/Buku_Konstruksi_2021_1-compress.pdf.

- . “Raih Penghargaan Anugerah Pengadaan 2023, Kementerian PUPR Terus Dorong Digitalisasi PBJ.” Accessed November 28, 2023. <https://pu.go.id/berita/raih-penghargaan-anugerah-pengadaan-2023-kementerian-pupr-terus-dorong-digitalisasi-pbj>.
- . *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, September 2020. Accessed March 12, 2023. https://binakonstruksi.pu.go.id/storage/Rencana_Strategis_DJBK_2020_2024_compressed.pdf.
- Kidron, Eithan. “Understanding Administrative Sanctioning as Corrective Justice.” *University of Michigan Journal of Law Reform*, no. 51.2 (2018): 313.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Accessed May 21, 2023. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Nugroho, Eko Rial. “Memaknai Kata ‘Wajib’ Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan.” *Sibatik Journal 2*, no. 9 (August 20, 2023): 2741–2748.
- P.J. Fitzgerald. *Salmond on Jurisprudence by P. J. Fitzgerald*. Indian Economy Reprint 2002. Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., 2002.
- Rajagukguk, Franki Boas. “Problematika Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia.” *Syntax Literate 7*, no. 6 (June 2022). Accessed December 1, 2023. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7303>.
- Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Reprinted. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002.
- Reini Wirahadikusumah. “Era Baru Konstruksi: Berkarya Menuju Indonesia Maju.” In *Buku Konstruksi 2021 Buku 1*, 16–27. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022. Accessed March 12, 2023. https://binakonstruksi.pu.go.id/storage/Buku_Konstruksi_2021_1-compress.pdf.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2020.
- Supardi, Een, and Muhammad Syaifuddin. “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi).” *Lex LATA 2*, no. 2

(January 19, 2022). Accessed February 13, 2023.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/823>.

Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 118.

Wulandari, Embun Nurani, and Pujiyono. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia (Studi Pada PT. Utama Karya (Persero)." *Jurnal Privat Law* 6, no. 2 (July 2, 2018): 196–201.

Yasin, Nazarkhan. *Kontrak Konstruksi di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

"Arti Kata Sanksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 19, 2023. <https://kbbi.web.id/sanksi>.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (BN.2020/No.483), n.d.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (BN.2020/No.1121), n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/159638/permen-pupr-no-1-tahun-2020>.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (LN.2020/No.107, TLN No.6494), n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LN. 2000 No. 64, TLN No. 3956), n.d.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 814/Pdt.G/2020/PN Sby (2020).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (LN.2017/No.11, TLN No.6018), n.d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN.2011/No. 82, TLN No. 5234), 2011.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LN.1999/No.54, TLN No.3833), n.d.